



BUPATI CIREBON

**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700.1/Kep.1223-Insp/2023

LAMPIRAN : 2 (DUA) LAMPIRAN

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud; dan
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 165 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Jadwal dan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	
	
	
	
JABATAN	PARAF	
ESELON II	[Signature]	
ESELON III	[Signature]	
ESELON IV	[Signature]	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700.1/Kep.1223-Insp/2023

TANGGAL : 18 Desember 2023

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon. Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024, dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b. review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - c. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. review laporan keuangan;
 - e. kegiatan pengawasan lainnya meliputi review HPS, probity audit, review laporan kinerja, review LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f. pengawasan atas pemberian hibah, dana transfer, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - g. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2. peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a) Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c) Pemberian layanan Konsultasi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah

perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;
- b) Kelembagaan;
- c) Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Pengelolaan Keuangan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f) Capaian Kinerja.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RPD 2025-2026, RPJPD 2025-2045, RENSTRA 2025-2026, RKPD Rubahan 2024, RKPD Murni 2025, KUA-PPAS Rubahan 2024, KUA-PPAS Murni 2025, RKA Perangkat Daerah Rubahan 2024, RKA Perangkat Daerah Murni 2025 dan Perencanaan Penganggaran Berbasis Gender);
- b) Reviu Laporan Keuangan (LKPD);
- c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- d) Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- e) Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f) Reviu Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- g) Reviu Harga Pokok Satuan (HPS);
- h) Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
- i) Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Manajemen ASN;
- j) Reviu Tata Kelola Perizinan;
- k) Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD);
- l) Reviu Akhir Masa Jabatan BUPATI;
- m) Reviu Tata Kelola Pendapatan Daerah; dan
- n) Peer Reviu (Telaah Sejawat) Intern dan Ekstern.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- b) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
- c) Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d) Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e) Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP;
- f) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah;
- g) Evaluasi Register Risiko;
- h) Evaluasi Benturan Kepentingan;
- i) Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi/ *Monitoring Prevention Center (MCP)*;
- j) Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan;
- k) Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- l) Monitoring Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- m) Monitoring Dampak Inflasi;
- n) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- o) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Provinsi dan Kabupaten;
- p) Penanganan Laporan Gratifikasi; dan
- q) Gelar Pengawasan Daerah.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/ Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.




III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

JUDUL	:
	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 700.1/Kep.1223-Insp/2023
 TANGGAL : 18 Desember 2023
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Kinerja												Rp 491.022.000				
1	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Program Perlindungan Perempuan	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	DPPKBP3A	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Dewan	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	DPUTR	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Sekretariat Daerah	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Kesehatan	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pendidikan	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	RSUD Waled	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	RSUD Arjawinangun	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Badan Pendapatan Daerah	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Objek Tema Stunting	Audit Kinerja Tematik	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, Dinsos, DPKPP, DPUTR, DKPP, Distan, Disdik, Bappelitbangda	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Objek Tema Kemiskinan	Audit Kinerja Tematik	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinsos, Disdik, Dinkes, DPKPP, Disdukcapil, DPMD, Dinkop, Disdagin, Bappelitbangda	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Objek Tema Investasi	Audit Kinerja Tematik	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	DPMPTSP, DPUTR, Disnaker, Bappelitbangda, Dinkop, Disdagin	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Objek Tema Pengendalian Inflasi Daerah	Audit Kinerja Tematik	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Bappelitbangda, Disdagin, Dinkop, Distan, DKPP, Bag. Perekonomian Setda	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Objek Tema Tingkat Pengangguran Terbuka	Audit Kinerja Tematik	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Bappelitbangda, Disnaker, Dinkop, Disdagin, Dinsos	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I Oktober 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
Reviu Laporan Kinerja												Rp 597.854.400					
1	Reviu RPD 2 Tahun (2025 - 2026)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa RPD telah disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	Bappelitbangda	Mg-I Januari 2024	Mg-III Januari 2024	1	1	1	1	12	16		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
2	Reviu Renstra 2025 - 2026	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Renstra telah disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-III Januari 2024	Mg-I Februari 2024	1	1	1	1	12	16		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
3	Reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Reviu	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mg-III Februari 2024	Mg-III Maret 2024	1	1	1	1	9	13					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Reviu Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah	Mg-III Februari 2024	Mg-III Maret 2024	1	1	1	1	9	13		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
5	Reviu Akhir Masa Jabatan Bupati	Reviu	Mengevaluasi capaian RPJM daerah serta memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati pada saat berakhir dari jabatannya	Kinerja Bupati dan Wakil Bupati	Maret 2024	Maret 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
6	Reviu RKPD Perubahan 2024	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RKPD berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RKPD Provinsi dan selaras dengan Visi Misi Bupati	Bappelitbangda	Juni 2024	Juni 2024	1	1	1	1	9	13		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
7	Reviu RPJPD (2025-2045)	Reviu	Menguji kesesuaian RPJPD dengan RPJMN dan/atau ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Bappelitbangda	Juni 2024	Juni 2024	1	1	1	1	10	14		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
8	Reviu RKPD Murni 2025	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa Informasi dalam RKPD berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RKPD Provinsi dan selaras dengan Visi Misi Bupati	Bappelitbangda	Mei 2024	Mei 2024	1	1	1	1	7	11		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
9	Reviu Rotasi Mutasi dan Promosi	Reviu	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
10	Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Reviu	Menilai pelaksanaan penerapan dan capaian SPM pada perangkat daerah pengampu	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKPP, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Damkar	Juli 2024	Juli 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Reviu PPDB	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan PPDB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan	Juli 2024	Juli 2024	1	1	1	1	10	14		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
12	Evaluasi Manajemen Risiko dan Reviu Register Risiko	Reviu	Melakukan pengujian, evaluasi, pelaporan, dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko.	Seluruh Perangkat Daerah	Agustus 2024	Agustus 2024	1	1	1	1	6	10					
13	Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Manajemen ASN	Reviu	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
14	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKPP, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Damkar	September 2024	September 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
15	Reviu P3K	Reviu	Meyakinkan pelaksanaan pengadaan PPPK telah sesuai dengan ketentuan/peraturan/perundang-undangan pada setiap tahapan yang dilakukan oleh Panselnas dan Pansel Instansi	BKPSDM	November 2024	November 2024	1	1	1	1	2	6		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
16	Reviu Tata Kelola PBJ	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.	UKPBJ Sekretariat Daerah											Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Reviu Tata Kelola Perizinan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku	DPMPTSP	Minggu II Maret 2024										Laptop, ATK		
18	Reviu Tata Kelola Pajak	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola pajak daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Pendapatan Daerah	Minggu II Maret 2024										Laptop, ATK		
19	Reviu Tata Kelola BMD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Minggu II Maret 2024										Laptop, ATK		
20	Reviu RPJMD	Reviu		Bappelitbangda			1	1	1	1	10	14			Laptop, ATK		
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												Rp 493.762.000					
1	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	SMPN yang dipilih menjadi objek pemeriksaan (3 Tim setiap Irban)	Mg-I Juni 2024	Mg-III Juni 2024	4	4	4	12	33	57			Laptop, ATK	Sedang	
2	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 pada Sekolah Dasar Negeri (SDN)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	SDN yang dipilih menjadi objek pemeriksaan (2 Tim setiap Irban)	Juli 2024	Juli 2024	4	4	4	12	33	57			Laptop, ATK	Sedang	
Reviu Laporan Keuangan												Rp 728.018.000					
1	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-IV Januari 2024	Mg-II Februari 2024	1	1	1	1	13	17		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
2	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	BKAD	Februari 2024	Februari 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Murni 2025	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD atas kesesuaian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 serta Rancangan KUA Daerah TA 2023	BKAD, Bappelitbangda	Mei 2024	Mei 2024	1	1	1	1	7	11		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
4	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Juni 2024	Juni 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
5	Reviu Analisa Standar Belanja (ASB)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Juli 2024	Juli 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
6	Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Juli 2024	Juli 2024	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2024	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD atas kesesuaian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 serta Rancangan KUA Daerah TA 2023	BKAD, Bappelitbangda	Juli 2024	Juli 2024	1	1	1	1	7	11		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
8	Reviu RKA Murni 2025	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah <u>penganggaran lainnya</u>	BKAD, Bappelitbangda	Agustus 2024	Agustus 2024	1	1	1	1	13	17					
9	Reviu RKA Perubahan 2024	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah <u>penganggaran lainnya</u>	BKAD, Bappelitbangda	Agustus 2024	Agustus 2024	1	1	1	1	10	14		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
10	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan <u>ketentuan yang berlaku</u>	Badan Keuangan dan Aset Daerah			1	1	1	1	9	13					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Reviu Dana Transfer	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2024	Mei 2024	1	1	1	1	3	7		1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Reviu Bantuan Keuangan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan bantuan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2024	Mei 2024	1	1	1	1	3	7		1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Reviu Hibah	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan hibah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2024	Mei 2024	1	1	1	1	3	7		1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Reviu Bansos	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan bansos telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2024	Mei 2024	1	1	1	1	3	7		1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan bansos telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mar, Jun, Sept, Des 2024	Mar, Jun, Sept, Des 2024	1	1	1	1	2	6		1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP												Rp 1.404.842.000					
1	Tindak Lanjut dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Evaluasi dan Monitoring	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Perangkat Daerah yang terkait	Jan-Des 2024	Jan-Des 2024	1	1	1	1	15	19		1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
Pengawasan Desa												Rp 1.312.857.600					
1	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2023 (Tahap I)	Audit Tujuan Tertentu	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Desa yang melangsungkan Pemilihan Kuwu pada tahun 2023 (Tim mengikuti Wilayah Irban) jumlah 135 desa + 73 desa = 208 Desa	Mg-III Januari 2024	Mg-I Maret 2024	4	4	4	12	27	49			Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2023 (Tahap II)	Audit Tujuan Tertentu	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Desa yang melangsungkan Pemilihan Kuwu pada tahun 2023 (Tim mengikuti Wilayah Irban)	Mg-IV Februari 2024	Mg-III Maret 2024	4	4	4	10	21	43			Laptop, ATK	Tinggi	
3	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2023 (Tahap III)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Desa yang melangsungkan Pemilihan Kuwu pada tahun 2023 (Tim mengikuti Wilayah Irban)	Mg-IV April 2024	Mg-IV Mei 2024	4	4	4	10	21	43			Laptop, ATK	Tinggi	
3	Pengelolaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2023	Audit Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada BUMDES telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penentuan objek pemeriksaan ditentukan kemudian hari berdasarkan hasil penilaian risiko dan pertimbangan manajemen lainnya. (Rencana 104 desa)	Agustus 2024	Agustus 2024									Laptop, ATK	Tinggi	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah												Rp 395.242.600					
1	Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan	Audit Investigasi	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berialan secara efektif	Perangkat Daerah yang terkait	Setiap Semester	Setiap Semester	1	1	1	1	9	13			Laptop, ATK	Tinggi	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu												Rp 1.342.590.000					
1.	Probit Audit	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	Perangkat Daerah yang menjadi sample (5 Proyek Strategis dibentuk 5 Tim)	Maret 2024	Maret 2024	1	5	5	5	10	26			Laptop, ATK	Tinggi	
2.	Pendampingan Desa Anti Korupsi	Asistensi/Pendampingan	Mendampingi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di tingkat desa.	Desa Panambangan Kec. Sedong, Desa Panongan Kec. Palimanan dan Desa Kedawung Kec. Kedawung	Mei 2024	Mei 2024	1	3	3	3	5	15			Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat		Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.											Laptop, ATK	Tinggi		
4	Evaluasi Benturan Kepentingan	Evaluasi dan Monitoring	Mengevaluasi pengelolaan penanganan benturan kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal pada instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait										Laptop, ATK	Tinggi		
5	Audit IT PBJ	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ kepatuhan pelaksanaan pengadaan secara elektronik terhadap Perundang-undangan yang berlaku				1	1	1	1	3	7		Laptop, ATK	Sedang		
6	Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi/ Monitoring Center For Prevention (MCP)	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui rencana aksi yang disusun	Seluruh Perangkat Daerah	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	1	1	1	1	9	13		Laptop, ATK	Sedang		
7	Stranas PK	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui rencana aksi yang sudah disusun oleh Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)	DPUTR	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	1	1	1	1	1	5		Laptop, ATK	Sedang		
8	Unit Pengendali Gratifikasi	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Cirebon rencana kerja yang sudah disusun oleh Tim UPG Kabupaten Cirebon.	Seluruh Perangkat Daerah	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	1	1	1	1	1	5		Laptop, ATK	Sedang		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Audit IT SPBE	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan, termasuk peraturan perundangan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika			1	1	1	1	3	7			Laptop, ATK	Sedang	
10	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR)											Laptop, ATK	Sedang	
11	Stock Opname dan Cash Opname	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek antara laporan akuntansi dengan realitanya.	Seluruh Perangkat Daerah (31 OPD + 40 Kecamatan)	Desember 2024	Desember 2024	1	4	4	4	32	45			Laptop, ATK	Sedang	
12	Audit Pengadaan Barang dan jasa	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku		Agustus-September 2024	Agustus-September 2024	1	4	4	4	3	16			Laptop, ATK	Sedang	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan												Rp 103.011.100					
1	Gelar Pengawasan Daerah	Evaluasi dan Monitoring	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi terhadap hasil pengawasan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah	Desember 2024	Desember 2024									Laptop, ATK	Rendah	
2	Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)	Sosialisasi	Meningkatkan kesadaran dan peran secara individu maupun kelompok dalam kegiatan anti korupsi	Inspektorat	Nov-Des 2024	Nov-Des 2024									Laptop, ATK	Rendah	
3	Pencanangan Desa Anti Korupsi		Mewujudkan program antikorupsi, sehingga pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan transparan serta mensejahterakan masyarakat		Desember 2024	Desember 2024									Laptop, ATK	Rendah	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan												Rp 152.531.300					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penilaian Kapabilitas APIP	Penguatan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Inspektorat	Mar-Juni 2024	Mar-Juni 2024	1	1	1	1	16	20			Laptop, ATK	Rendah	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												Rp 296.039.100				
1	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Asistensi/ Pendampingan	Menilai kegiatan sapu bersih pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana	Unit Saber Pungli											Laptop, ATK	Sedang	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah												Rp 317.080.700				
1	Evaluasi SIMONA	Evaluasi	Melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan tambahan penghasilan pegawai di pemerintah daerah		Mg-I Februari 2024	Mg-II Februari 2024	1	1	1	1	1	5			Laptop, ATK	Rendah	
2	Monitoring dan Evaluasi LHKAN	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan atas pengisian LHKAN yang dilakukan oleh para PN/WL telah sesuai dengan data yang seharusnya	Seluruh Perangkat Daerah	Tw-IV Jan-Mar 2024	Tw-IV Jan-Mar 2024	1	1	1	1	1	5			Laptop, ATK	Rendah	
3	Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah	Monitoring dan Evaluasi	Menilai pengelolaan APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-II Juni, September dan Desember 2024	Mg-II Juni, September dan Desember 2024	1	1	1	1	2	6		3 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	
4	Monitoring dan Evaluasi SPIP	Monitoring dan Evaluasi	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Seluruh Perangkat Daerah	Mar-Juni 2024	Mar-Juni 2024	1	1	1	1	16	20			Laptop, ATK	Rendah	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Evaluasi/ Reviu/ Monitoring	Memperoleh update kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan, serta realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring mingguan, Evaluasi bulanan, Reviu Triwulan	Monitoring mingguan, Evaluasi bulanan, Reviu Triwulan	1	1	1	1	5	9			Laptop, ATK	Sedang	
6	Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG	Seluruh Perangkat Daerah	September 2024	September 2024	1	1	1	1	1	5			Laptop, ATK	Rendah	
8	Survei Penilaian Integritas	Asistensi/Pendampingan	Menilai dan mengukur tingkat indeks integritas melalui metode survei yang dilaksanakan oleh KPK pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Seluruh Perangkat Daerah	November 2024	November 2024	1	1	1	1	1	5			Laptop, ATK	Rendah	
9	Pendampingan Manajemen Risiko	Asistensi/Pendampingan	Pendampingan dalam penentuan permasalahan dan konteks risiko pada tiap kegiatan, menyusun indentifikasi risiko, penentuan analisis dan prioritas risiko, pelaksanaan penerapan manajemen risiko, pelaksanaan evaluasi risiko, pemantauan berkelanjutan dan telaah ulang, serta koordinasi dan komunikasi dengan penanganan risiko	Seluruh Perangkat Daerah											Laptop, ATK	Rendah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												Rp 1.415.295.500				
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Bimtek Siswaskeudes, Diklat Pengelolaan Keuangan Desa)	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Pegawai Inspektorat											Laptop, ATK	Rendah	




No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dal nis	KT	AT	Σ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												Rp 94.145.300				
1	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Reviu	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Mg-IV Agustus 2024	Mg-I September 2024	1	1	1	1	12	16		1 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	
2	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)	Reviu	Menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Mg-I September 2024	Mg-II September 2024	1	1	1	1	12	16		1 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												Rp 174.061.100				
1	Sosialisasi Anti Korupsi/ Layanan Pengaduan/ Penanganan Gratifikasi	Sosialisasi	Memperluas peran APIP dengan memberikan rekomendasi yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi di masa mendatang	Seluruh Perangkat Daerah											Laptop, ATK	Sedang	

Keterangan: Tentatif

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,


IMRON